

Tabel IV.9
Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah Dalam Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Program Prioritas	Indikator	2024		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing						
Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-Rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus	67,69%	2.270.669.787.645	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PP-1
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	88,48%			
		Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100%			
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94,87%			
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	87,49%			
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100%			
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79%			
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	94%			
		Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	60,34%			
2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	100%	17.576.846.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PP-1
Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	10,8 rasio	176.814.368.000	Dinas Kesehatan	PP-2

No	Program Prioritas	Indikator	2024		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
4	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lulusan pelatihan kerja yang dimagangkan dan bekerja	65%	3.443.647.800	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PP-1
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
5	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	57,64%	21.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-1
Sasaran 4: Meningkatkan daya saing perempuan						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
6	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	400 Orang	4.906.959.000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PP-1
Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas						
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
7	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	1%	55.635.043.182	Dinas Kehutanan	PP-3
		Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47%			
		Produksi hasil hutan kayu	4420000 m3/tahun			
		Produksi hasil hutan bukan kayu	850 ton			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM potensial ekspor	20 UKM	1.347.190.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	

No	Program Prioritas	Indikator	2024		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM yang masuk pasar digital	5%	6.998.165.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	PP-3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
10	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	67 jenis	1.570.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	PP-3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
11	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan industri pengolahan non migas dan non batubara	5,20%	9.520.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	PP-3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
12	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (%)	30,00%	10.673.000.000	Dinas Pariwisata	PP-3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
13	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100%	2.750.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PP-3
		Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu	100%			
14	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kepeminatan Investasi di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara	11 Minat	2.600.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PP-3
15	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan	2 Dokumen IPRO	2.700.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PP-3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
16	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas kebun yang dibangun (Ha)	50702 Ha	600.000.000	Dinas Perkebunan	PP-3

No	Program Prioritas	Indikator	2024		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
17	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan sarana perkebunan	25,36%	20.852.056.400	Dinas Perkebunan	PP-3
18	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya	11,15%	5.026.179.200	Dinas Perkebunan	PP-3
		Persentase kelembagaan petani yang kapasitasnya meningkat	26,50%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
19	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	97.6 Skor	3.909.764.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PP-3
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	86.3 Skor			
20	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan	0%	4.200.000.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PP-3
		Jumlah kecamatan yang meningkat status ketahanan pangannya	1 Kecamatan			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
21	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana pertanian tanaman pangan	41,39%	3.800.000.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PP-3
		Tingkat pemenuhan prasarana pertanian hortikultura	34%			
22	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan sarana pertanian tanaman pangan	35,50%	24.519.950.500	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PP-3
		Tingkat pemenuhan sarana pertanian hortikultura	39,29%			
23	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya	77%	2.849.500.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PP-3

No	Program Prioritas	Indikator	2024		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
24	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	99,54 Skor	1.300.734.098	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PP-3
25	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis	96,21 Skor	37.304.182.274	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PP-3
		Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	87,53 Skor			
26	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ	91,79 Skor	10.089.966.422	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PP-3
		Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	95,11 Skor			
		Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	98,68 Skor	1.780.474.210		
27	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	99,74 Skor	4.023.794.539	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PP-3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
28	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	190000 Ton	30.167.174.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	PP-3
29	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	200000 Ton	10.937.395.361	Dinas Kelautan dan Perikanan	PP-3
30	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produk olahan hasil perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	7 Produk Olahan	4.164.364.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	PP-3

No	Program Prioritas	Indikator	2024		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
Sasaran 6: Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
31	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	12936 Orang	21.777.911.886	Dinas Sosial	PP-5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
32	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa Yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal	25,00%	8.104.662.300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	PP-5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
33	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	108,10 Ha	178.238.293.600	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
34	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Disparitas harga barang pokok dan barang penting	16%	1.245.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	PP-5
		Persentase kinerja realisasi pupuk	85%			
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
35	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Persentase layanan lalu lintas jalan provinsi dan AKDP	82%	14.192.000.000	Dinas Perhubungan	PP-4
		Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan	0,006 Angka			
		Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	175 Kejadian			

No	Program Prioritas	Indikator	2024		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
36	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio kemantapan jalan provinsi	82,09%	1.169.877.261.683	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4
		Penambahan Ruas Jalan Baru	1 ruas			
37	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	9460 Ha	317.066.477.680	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4
		Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	70 Ha			
		Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	94 Lt/detik			
		Panjang pantai kritis yang ditangani	2,8 Km			
38	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang berfungsi baik	11,15%	43.650.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4
39	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	57,65%	165.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4
40	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	57,64%	21.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4
40	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	83,20 Skor	13.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4

No	Program Prioritas	Indikator	2024		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
41	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	108,10 Ha	178.238.293.600	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						
42	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase kelurahan/desa yang teraliri listrik 24 jam	92,97%	45.162.580.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PP-4
		Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani	100,00%			
		Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	250 kWp			
		Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN	34,10%			
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup						
Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
43	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Pencemaran	≤5 (Tercemar Ringan) Indeks	9.202.247.305	Dinas Lingkungan Hidup	PP-6
		Indeks Standar Pencemar Udara	48 (baik) Indeks			
Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
44	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	1%	55.635.043.182	Dinas Kehutanan	PP-6
		Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47%			

No	Program Prioritas	Indikator	2024		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
		Produksi hasil hutan kayu	4420000 m3/tahun			
		Produksi hasil hutan bukan kayu	850 ton			
45	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas kawasan bernilai ekosistem penting dan konservasi provinsi yang dikelola	610540.98 Hektar	5.826.687.000	Dinas Kehutanan	PP-6
46	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	10.104 Ha	3.728.275.000	Dinas Kehutanan	PP-6
47	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20.000 Ha	35.924.564.841	Dinas Kehutanan	PP-6
		Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Kelompok			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
48	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)	100%	6.915.440.100	Dinas Perkebunan	PP-6
Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						
49	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase desa yang dibangun PLTS pada desa belum berlistrik PLN	34,10%	45.162.580.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PP-6
		Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	250,00 kWp			
		Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani	100%			
		Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	92,97%			
50	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi	243.246, 516 Ton	49.004.873.000		PP-6

No	Program Prioritas	Indikator	2024		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
			CO2e/Tahun		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		Persentase Instansi Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Bauran Energi	43,76%			
		Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Bauran Energi	33,56%			
Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi						
Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK						
KEPEGAWAIAN						
51	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks NSPK Manajemen ASN	90 indeks	25.023.390.800	Badan Kepegawaian Daerah	PP-7
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
52	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	86 Persen	26.500.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PP-7
SEKRETARIAT DAERAH						
53	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	1 PD	5.400.000.000	Biro Organisasi	PP-7
		Indeks Kelembagaan	72 Indeks			
		Indeks Kematangan Organisasi	44 Indeks			
		Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	86%			
		Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)	40%			

No	Program Prioritas	Indikator	2024		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
54	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik	80%	23.600.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	PP-7
INSPEKTORAT DAERAH						
55	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal pemda provinsi dan kab/kota	100%	16.870.000.000	Inspektorat	PP-7